

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya komentar dari masyarakat tentang berhasil tidaknya instansi pemerintah dalam menjalankan amanah, menunjukkan harapan masyarakat yang harus direspon dengan baik. Namun antara harapan dengan realita sering berbeda. Artinya terjadi kesenjangan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan *direct users*.

Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan pedoman mutu manajemen instansi pemerintah. Hal ini sebagai akibat belum adanya sistem penilaian kualitas kerja formal yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan instansi pemerintah.

Para pengelola pemerintah sering mempunyai mindset bahwa ukuran keberhasilan ditekankan pada kemampuan menyerap anggaran. Jadi, suatu instansi pemerintah berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah. Meskipun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program kerja tersebut masih berada dibawah standar. Sementara masyarakat mengharapkan keberhasilan adalah tindakan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pada era saat ini, fenomena pengukuran keberhasilan hanya menekankan pada finansial saja. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk memperbaiki indikator keberhasilan agar lebih mencerminkan kualitas kerja yang sesungguhnya. Melalui suatu penilaian kualitas kerja, keberhasilan akan lebih dilihat dari kemampuan instansi berdasarkan dari sumber yang dikelolanya. Sehingga dapat dicapai hasil yang sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas. Indikator kualitas kerja adalah ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat penyampaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kualitas kerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas kerja. Baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah program kerja selesai. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kualitas kerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan program kerja suatu instansi pemerintah.

Menilai kualitas kerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan program kerja. Hal tersebut bertujuan untuk pencapaian tujuan, visi dan misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk atau jasa. Pada organisasi swasta, ukuran kinerja ini adalah berupa tingkat laba. Namun organisasi sektor publik tidak bisa hanya menggunakan ukuran laba untuk menilai keberhasilan. Karena memang tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Bagian perencana teknis pada instansi pemerintah tidak kalah penting dengan bagian-bagian lainnya. Karena bagian perencana teknis berhubungan langsung dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, Bagian Perencana Teknis harus dikelola dengan sebaik mungkin.

Untuk memastikan Bagian Perencana Teknis telah berjalan dengan baik, dan agar kualitas kerja dapat terwujud dengan hasil yang optimal sesuai yang diinginkan, maka instansi pemerintah harus melakukan perbaikan secara rutin. Hal ini dengan melakukan audit manajemen khususnya terhadap bagian perencana teknis. Karena audit tidak hanya dapat memperlancar perubahan tetapi juga dapat digunakan sebagai suatu alat untuk perbaikan.

Audit ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari salah satu bagian yang ada pada instansi pemerintah yaitu Bagian Perencana Teknis. Dalam tahap audit ini, maka auditor melakukan analisa terhadap tujuan dari setiap program kerja kemudian mengkaji hasil

analisa tersebut. Seringkali misalnya, masalah yang terjadi adalah peran dan tanggung jawab tidak terdefiniskan dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi penghambat dari tujuan instansi pemerintah itu. Melalui audit manajemen Bagian Perencana Teknis, maka masalah ini dapat terungkap untuk kemudian dicari solusinya.

Bagian perencana teknis dikatakan efektif bila mampu menghasilkan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan. Sehingga perusahaan dapat terus menjawab perubahan operasi maupun perubahan yang terjadi pada lingkungan. Audit manajemen digunakan untuk menentukan sejauh mana program kerja atau aktivitas perencana teknis memberikan kontribusi terhadap sasaran instansi pemerintah. Sehingga dapat melaksanakan bagian secara efektif dengan suatu resiko biaya dan manfaat yang menguntungkan.

Ada beberapa program kerja Bagian Perencana Teknis seperti pemrograman dan penganggaran jalan kota, perbaikan dan pembuatan saluran-saluran air (*drainase*) untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya banjir. Pembangunan jalan, jembatan dan pedestrian untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya.

Terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh instansi pemerintah, antara lain bagaimana penilaian masyarakat, apa yang harus diunggulkan, apakah instansi pemerintah dapat melakukan perbaikan dan menciptakan nilai positif secara berkesinambungan. Oleh karena itu, audit manajemen sangat dibutuhkan untuk melihat gambaran kesehatan dan keefektifan instansi pemerintah secara kompetitif dalam pencapaian tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai penerapan audit manajemen sebagai tolak ukur kualitas kerja, maka skripsi ini mengambil obyek penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan (DPU BMP) Kota Surabaya.

DPU BMP yang berlokasi di Jl. Jimerto No. 6 – 8 Surabaya, adalah sebuah instansi Pemerintah di bidang bina marga dan pematuan. DPU BMP mengelola sistem jalan

termasuk paving, dan pengelolaan sistem *drainase* (saluran air) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyedia jasa layanan publik, diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas kerja yang baik secara memuaskan. Untuk melakukan bagian pelayanan itulah, DPU BMP Kota Surabaya harus meningkatkan kualitas kerja dengan indikator-indikator yang valid dan rasional untuk mengukur apakah misi dan tujuannya telah tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah adalah :

- a. Apakah audit manajemen yang terdiri dari standar kinerja dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas kerja perencana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya?
- b. Apakah audit manajemen yang terdiri dari standar kinerja dan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas kerja perencana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah audit manajemen yang terdiri dari standar kinerja dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas kerja perencana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- b. Untuk mengetahui apakah audit manajemen yang terdiri dari standar kinerja dan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas kerja perencana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dalam penelitian ini ada tiga manfaat yang ingin dicapai :

1.4.1 Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi pihak perusahaan untuk penerapan sistem penilaian kualitas kerja guna pencapaian visi dan misi DPU BMP Kota Surabaya.

1.4.2 Kontribusi Teoritis

Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa lain yang sedang melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi bagi pemerintah Kota Surabaya, untuk mendukung dan memfasilitasi setiap program kerja yang direncanakan agar dapat dilaksanakan dengan baik.